

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

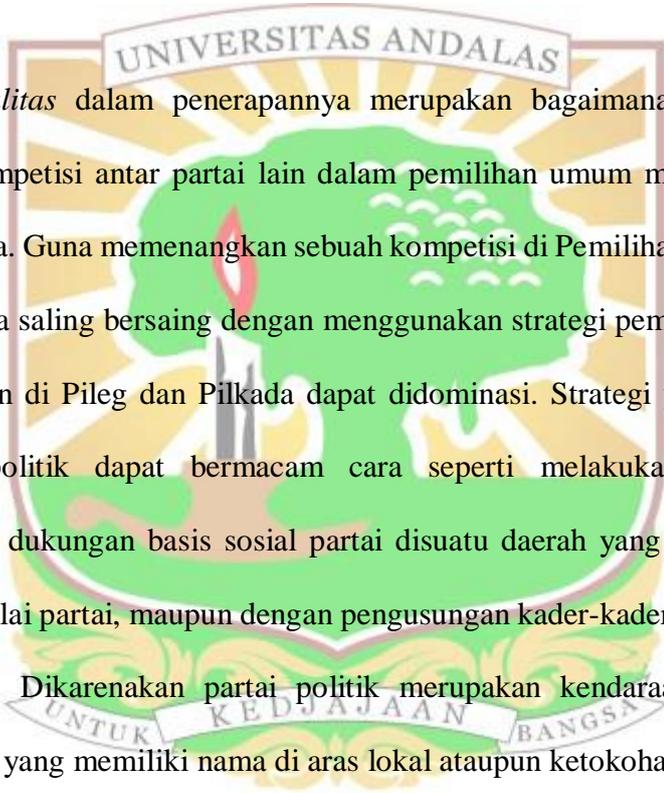
Dalam kurun kurang dari satu abad proses kakunya transisi kekuasaan di Indonesia ditandai dengan dominasi pertahanan suatu partai politik. Dapat terlihat dominasi partai politik dalam mempertahankan kekuasaannya hampir tidak mengubah transisi kekuasaan di pemerintahan yang diisi oleh aktor-aktor lama di partai yang berkuasa, baik itu dalam mengendalikan sistem pemerintahan di Eksekutif maupun Legislatif. Partai politik sendiri diartikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisir yang mana anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai yang sama dan mempunyai cita dan tujuan yang sama pula untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna menjalankan program yang telah ditentukan.¹ Dalam hal ini upaya dominasi dan *survival* (bertahan) partai politik sudah menjadi naluri alami disebuah negara demokrasi seperti halnya di Indonesia.

Ketika semua partai politik menerapkan *strategy of survival* maka akan ada partai politik yang memiliki kekuasaan menerapkan *politic of survival* yaitu strategi partai politik dan kekuasaan untuk mempertahankan posisi maupun kekuasaannya dalam situasi konflik itu.² Pelabelan terminologi “politik” pada bentuk *survivalitas* ini tidak terlepas dari tujuan partai politik ini yaitu untuk mempertahankan dan merawat pengaruh dan kekuasaan mereka karena pada dasarnya suatu perhatian

¹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² Joel s Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World* (Princeton University Press, 1998).

politik tidak akan jauh dari pengaruh (*power*) dan kekuasaan. Dalam kehidupan politik normatif (*on the daily basis*) mereka akan berupaya menempatkan dirinya pada tempat yang tepat untuk mempertahankan kekuasaan dalam sebuah moment politik tertentu. Sepertinya halnya ketika kontestasi pemilu, partai politik dapat merubah struktur pemerintahan lokal yang berimbas pada mereka, partai politik ini akan berlaku pragmatis dan oportunitis demi mengamankan kekuasaan di masa mendatang.



Survivalitas dalam penerapannya merupakan bagaimana sebuah partai mampu berkompetisi antar partai lain dalam pemilihan umum melalui dominasi perolehan suara. Guna memenangkan sebuah kompetisi di Pemilihan Umum, partai politik tentunya saling bersaing dengan menggunakan strategi kemenangan politik agar persaingan di Pileg dan Pilkada dapat didominasi. Strategi yang digunakan oleh partai politik dapat bermacam cara seperti melakukan upaya-upaya memanfaatkan dukungan basis sosial partai disuatu daerah yang telah terafiliasi dengan nilai-nilai partai, maupun dengan pengusungan kader-kader terbaik mereka dalam pemilu. Dikarenakan partai politik merupakan kendaraan politik oleh kandidat calon yang memiliki nama di aras lokal ataupun ketokohnya yang telah diakui oleh masyarakat, sehingga akan adanya korelasi yang saling menguntungkan dalam dinamika proses tawar menawar perpolitikan ini.

Berbicara kembali terkait basis sosial yang telah mengidentifikasi orientasi politiknya pada sebuah partai dalam sebuah kontestasi pemilu, banyaknya pemimpin pemerintahan yang menyadari masa jabatannya tergantung pada kelompok sosial tertentu dan stabilitas sosial sehingga terdapat kemungkinan para

aktor politik maupun pemilik kekuasaan itu bekerjasama.³ Bentuk utama politik bertahan hidup dalam mempertahankan dominasi, strategi kontrol sosial maupun mobilisasi di tengah-tengah masyarakat, yaitu pentingnya struktur kelembagaan dari partai politik agar mampu mendominasi dalam persaingan perebutan kekuasaan ketika Pemilihan Umum di ranah politik lokal.

Partai politik yang mendominasi umumnya akan bertahan dalam Pemilihan Umum berikutnya agar kemenangan dapat diperoleh kembali dan tentunya untuk menghindari transisi kekuasaan dominasi dengan partai lainnya melalui kompetisi politik. Seberapapun kontroversialnya pemilu yang terjadi, selalu berjalan dengan kaca mata demokrasi agar panutan demokrasi dunia tidak ricuh. Tentunya dengan kompetisi dan perebutan tonggak kekuasaan antara satu partai dengan partai lain akan membuat suatu partai politik menggunakan strategi agar dapat mendominasi suatu daerah melalui upaya-upaya dalam menaikkan elektabilitas.

Tentunya elektabilitas suatu partai politik disuatu daerah ditentukan oleh strategi partai dengan perencanaan yang matang untuk memenangkan persaingan, dalam hal ini partai haruslah tanggap dan peka terhadap berbagai perubahan peta politik, sehingga dapat mempengaruhi perilaku memilih dari masyarakat untuk mengikutinya dalam proses pemilihan umum. Keberhasilan partai dalam bertahan dan mendominasi setidaknya didasari oleh keunggulan mereka dalam menguasai

³ Lambach Daniel, *State in Society: Joel Migdal and the Limits of State Authority. Paper for Presentation at the Conference "Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, Territoriality, Democracy"* (Danish Political Theory Networks Conference, University of Copenhagen, Departement of Political Science, 2004).

lingkungannya dengan tindakan-tindakan, simbol-simbol maupun kebaikan lainnya.⁴

Penjelasan strategi politik melalui upaya-upaya pemanfaatan basis sosial yang telah mengidentifikasi orientasi politiknya dengan nilai-nilai partai, memiliki relevansi yang begitu kuat terkait persoalan etno politik disuatu daerah yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah partai melalui afiliasi dengan kelompok etnik. Sebab, tantangan partai yang memiliki suara minoritas disuatu daerah yang luas sebenarnya adalah bagaimana mereka tetap eksis di hadapan superioritas kelompok mayoritas melalui dominasi di daerah yang lebih kecil lagi. Karena itu, etno politik sejatinya merupakan bagian strategi yang dilakukan oleh partai yang memiliki suara minoritas agar dapat mempertahankan eksistensinya di hadapan kelompok mayoritas disuatu daerah.

Pemanfaatan etno politik sebagai sebuah gerakan politik ini, dikonstruksi melalui ekonomi dan politik lokal.⁵ Akan tetapi, dalam perkembangannya, etno politik justru diambil alih oleh partai politik untuk mengukuhkan dominasi kekuasaannya. Etno politik ini dieksploitasi demi melanggengkan kekuasaan. Sentimen etnik sebagai bagian dari sistem politik yang digunakan oleh partai politik ini bertujuan meminggirkan partai politik lain yang dipandang berlawanan dengan kepentingan dan tujuan politik partai itu sendiri.

⁴ Mohtar Masoed, *Perbandingan Sistem Politik*, cetakan ke. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

⁵ Sofyan Sjaf, *Politik Etnik: Dinamika Lokal Di Kendari* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Strategi politik dengan memanfaatkan berbagai faktor eksistensi partai politik, tentunya akan berkorelasi dengan suatu upaya dalam mempertahankan maupun menjalankan suatu kekuasaan yang secara terorganisir dapat mendominasi suatu daerah dengan cara yang demokratis. Hal ini juga didukung oleh kepandaian partai politik dalam memahami dinamika disuatu daerah sehingga menjadi suatu keharusan dalam mengambil hati masyarakat untuk perkembangan dan kepentingan umum disuatu daerah. Seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disebut PDI-Perjuangan, dalam pemerintahan berskala Nasional banyak daerah diseluruh Indonesia yang mempunyai kedekatan nilai politik dengan PDI-Perjuangan yang mana partai ini memiliki slogan *partai wong cilik* yang mencitrakan partai mereka sebagai yang paling dekat dengan rakyat kecil.

Dikarenakan PDI-Perjuangan dekat ikatannya dengan masyarakat *Grassroot* untuk memperjuangkan orientasi masyarakat kalangan menengah kebawah berdasarkan Marhaenisme. Bahkan terdapat survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional, yaitu Poltracking pada Tanggal 20 Oktober 2023, dengan pertanyaan "Partai politik mana yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan hari ini?" dalam hasil surveynya sebanyak 20,26 persen responden menjawab masih akan memilih PDIP.⁶ Setidaknya selama 20 tahun terakhir PDI-Perjuangan menjadi salah satu partai dominan dikancah perpolitikan, seperti di Pulau Jawa

⁶ Amriyono Prakoso, "Survei Poltracking Jika Pemilu Sekarang PDIP Masih Ungguli Gerindra Dan Golkar," *Tribunnews*, 2015, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/survei-poltracking-jika-pemilu-sekarang-PDIP-masih-ungguli-gerindra-dan-golkar>.

yang mana di Jawa Tengah PDI-Perjuangan selalu menjadi partai penguasa semenjak orde baru runtuh.⁷

Selain itu partai ini cukup dapat mendominasi struktur pemerintahan yang didalamnya juga terdapat orang-orang penting dari partai PDI-Perjuangan, misalkan dalam konteks periode 2019 seperti Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, jajaran Kementrian seperti Tri Rismaharini, beberapa Gubernur seperti Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dalam Pemilu 2014 dan 2019 PDI Perjuangan memenangkan perolehan suara Nasional Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Legislatif.

Namun berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, partai ini dari tahun ke tahunnya tidak pernah menghasilkan posisi yang begitu kuat di jabatan strategis di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari rekam jejak PDI-Perjuangan di tanah Sumatera Barat selalu menjadi pembicaraan terkait mayoritas masyarakat Minangkabau yang belum menyukai partai tersebut dalam tonggak kekuasaan secara nilai historis di Pemilu, yang mana PDI-Perjuangan tidak pernah menang dalam Pemilu di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1955 Sumatera Barat memang menjadi basis utama Masyumi yang dihapuskan oleh Soekarno akibat dituduhnya elit-elit partai Masyumi terlibat dengan gerakan yang dilarang pemerintah saat itu yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Permesta) serta masyarakat Sumatera Barat sedari awal tidak menyukai politik dicampurkan agama. Pengerahan kekuatan militer dari Soekarno tersebut menjadi

⁷ Krisna Widyanto, "Studi Tiga Wajah Parati: Otonomi Dalam PDI Perjuangan Di Surakarta," *POLGOV* (2022).

awal perpecahan yang menyebabkan luka yang mendalam bagi etnis masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat kepada presiden Soekarno yang berimplikasi kepada PDI-Perjuangan, representasi dari Presiden Soekarno.⁸

Akan tetapi, dari rendahnya persentase suara dan dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap partai yang bergambarkan banteng bermoncong putih tersebut pada tiap pemilunya, terdapat suatu kabupaten yang menjadi lumbung suara PDI-Perjuangan di Sumatera Barat. Yaitu Kabupaten Dharmasraya yang mekar dari Sawahlunto/Sijunjung Tanggal 7 Januari Tahun 2004 dan diresmikan oleh presiden RI secara simbolik di istana negara.⁹ Dahulu, wilayah ini merupakan lokasi tujuan transmigrasi bedol desa pada era pemerintahan Presiden Soeharto pada dekade 1970-an. Ketika itu, wilayah ini masih bergabung dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Sekitar 3.200 keluarga yang terdampak pembangunan waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, dipindahkan ke wilayah ini. Kebijakan ini turut membawa Dharmasraya sebagai wilayah yang plural.

Pluralitas ini juga didukung oleh kondisi Dharmasraya sebagai wilayah transit, baik dari sisi perdagangan maupun transportasi. Dampaknya, Dharmasraya tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang homogen. Selain penduduk setempat dan transmigran bedol desa, turut pula hadir transmigran swakarsa, baik dari Sumatera Barat maupun luar daerah Sumatera Barat. Kondisi inilah yang turut mendorong Dharmasraya memiliki dinamika politik yang berbeda dibandingkan wilayah

⁸ BBC News Indonesia, "Puan, Sumbar, Dan Jejak Kekalahan PDIP Di Tanah Minang: 'Antara Narasi Partai Non-Islam Dan Luka Masa Lalu Pada Sukarno,'" 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54062728>.

⁹ Kemenag Sumbar, "Sejarah Kabupaten Dharmasraya."

lainnya di Sumatera Barat. Kondisi ini menggambarkan bahwa PDI-Perjuangan menjadi partai yang diperhitungkan dalam kancah politik di Dharmasraya. Dikarenakan pada wilayah ini, PDI-P berhasil meraup suara dominan dalam kontestasi lokal, sehingga dianggap berhasil mewujudkan tatanan kepartaian sebagai partai penguasa. Dominasi PDI-Perjuangan tidak hanya mempertahankan kekuasaannya pada kursi Legislatif di Kabupaten Dharmasraya, namun juga di Eksekutif.

Tentunya terdapat strategi PDI-Perjuangan khususnya di Sumatera Barat dalam merawat Dapil dan pemilihnya, walaupun persentase suaranya jauh dibawah rata-rata untuk kasus di Sumatera Barat, akan tetapi grafiknya naik di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu strategi politik yang digunakan oleh PDI-Perjuangan di Dharmasraya, mereka mampu melakukan strategi dalam beberapa upaya-upaya menaikkan elektabilitas dengan mengidentifikasikan etno politik di Dharmasraya, khususnya Etnik Jawa dengan partainya, yang mana nilai-nilai yang ditanam dalam partai salah satunya slogan *partai wong cilik* terafiliasi dengan orientasi politik Etnik Jawa. Hal ini juga tidak terlepas dari kader-kader partai yang diusung oleh PDI-Perjuangan merupakan tokoh yang memiliki nama di di Dharmasraya. Sehingga Etnik Minang lebih mengutamakan ketokohan figur publik, sedangkan Etnik Jawa disini mengidentifikasikan orientasi politiknya pada ideologi partai serta dengan popularitas tokoh lokal yang dianggap lebih memperhatikan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Dalam mempertahankan dominasinya, PDI-Perjuangan dibilang konsisten mulai dari periode 2014-2019 hingga periode 2019-2024. Hal ini tentunya tidak

terjadi begitu saja, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi strategi politik *survivalitas* PDI-Perjuangan dalam mendominasi politik lokal di Kabupaten Dharmasraya, walaupun berada di provinsi yang masyarakatnya secara umum tidak menyukai historisitas partai ini. Beberapa faktor yang mendukung *survivalitas* PDI-Perjuangan di Dharmasraya bisa saja dipengaruhi oleh sosio-kultural masyarakat berupa etno politik serta strategi dan kompetisi politik yang dibangun, hal ini berdampak pada anomali kekuasaan di daerah tersebut.

Jika melihat penelitian-penelitian sebelumnya dan setelah melakukan literatur review terhadap jurnal-jurnal penelitian yang sama dengan tema yang diteliti, memiliki kesamaan dalam konsep dominasi partai politik dan *survivalitas* partai politik. Yaitu dari penelitian Vivit Aprilia Amin dengan *Judul Dominasi Politik Partai Golkar di Kabupaten Pangkep*¹⁰ yang fokus kepada dominasi partai telah mengakar kuat dikarenakan partai Golkar menjadi partai tertua yang ada di Pangkep dan menjadi turun temurun oleh masyarakat.

Lalu dari penelitian Subhan Agung dan Hendra Gunawan dengan judul *Studi Dimensi Systemness dan Dimensi Reification dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi*¹¹, dan lanjutan dari penelitian tersebut yaitu penelitian dari Subhan Agung dan Hendra Gunawan dengan judul *Studi Dimensi Value Infusion dan Authonomy dalam*

¹⁰ Vivit Aprilia Amin, "Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Pangkep" (Hasanuddin University, 2018).

¹¹ Rino Agung, Subhan dan Sandawa Putra, "Studi Dimensi Systemness Dan Dimensi Reification Dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi," *Universitas Siliwangi* vol 2 no 1 (2016).

*Institusionalisasi Kepartaian PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi.*¹²

Dalam 2 penelitian ini sama-sama memfokuskan tentang *survivalitas*. Tetapi memiliki fenomena yang sama sebagai alasan penelitian ini dilakukan melalui teori lanjutannya. Yaitu, bagaimana institusionalisasi kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat mendominasi secara signifikan baik di Eksekutif maupun di Legislatif dalam politik lokal.

Selanjutnya penelitian dari Ovi Amalia Sari dengan judul *Politik Identitas Etnik dan Agama Partai Aceh dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh* yang fokus penelitiannya yaitu Partai Aceh dapat memanfaatkan aspek etno politik melalui pengidentifikasian dirinya di tengah masyarakat melalui etnik warga Aceh dan agamanya.¹³

Setelah melakukan literature review terhadap jurnal di atas, sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu lebih membahas dominasi partai dari awal masa terbentuknya partai politik dan mampu bertahan di tonggak kekuasaan di daerah tersebut dengan pemetaan politik dibarengi dengan pengetahuan dinamika yang terjadi di daerah tersebut sehingga dapat mendominasi. Hal ini hanya bersifat sejarah partai yang dekat dengan masyarakat di daerah untuk memilihnya dalam Pemilu. Selain itu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dominasi kekuasaan secara kelembagaan partai dan faktor etnik saja.

¹² Hendra Agung, Subhan dan Gunawan, "Studi Dimensi Value Infusion Dan Authonomy Dalam Institusionalisasi Kepartaian PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi," *Universitas Siliwangi* (2013).

¹³ Ovi Amalia Sari, "Politik Identitas Etnis Dan Agama Partai Aceh Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh" (Lampung University, 2022).

Maka peneliti menghadirkan dalam penelitian ini suatu *Novelty* (kebaruan) atau yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu. Yaitu penelitian ini mencoba melihat faktor-faktor yang muncul dari dominasi partai politik disuatu daerah dikarenakan adanya keterkaitan dari faktor etno politik dengan strategi dan kompetisi partai politik yang dibangun sebagai suatu upaya *survivalitas*, yang mana letak keunikannya partai politik ini dapat mendominasi disuatu daerah dikarenakan pilihan kelompok masyarakat berpengaruh terhadap orientasi politik suatu etnik terhadap nilai-nilai yang ditanamkan oleh partai. Daerah yang didominasi oleh partai ini pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat tersebut akan tetapi dengan beberapa faktor yang terjadi di daerah tersebut dapat mempengaruhi dominasi antar persaingan politik partai diranah politik lokal.

Dengan adanya konsep strategi politik dan kompetisi politik yang menjelaskan keterkaitannya dengan etno politik, berpengaruh terhadap *survivalitas* PDI-Perjuangan dalam perpolitikan di Kabupaten Dharmasraya. Dikarenakan adanya Etnik Jawa yang terdiri dari 33% masyarakat yang sedari dulu juga merupakan loyalis Soekarno sebagai refleksi dari PDI-Perjuangan dan juga memiliki kedekatan historis sehingga terdapat kecendrungan pemilih Jawa menguntungkan dominasi PDI-Perjuangan. Hal ini didasari bagaimana suatu konsep etnik yang menjelaskan sebuah eksistensi lembaga dalam aspek sosiologis memiliki kedekatan dengan lingkungan budaya setempat,¹⁴ dalam hal ini adalah partai politik dengan etnik disuatu daerah lokal.

¹⁴ Robert Michels, *Political Parties A Sociological Study of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, ed. Eden and Cedar Paul (Ontario: Batoche Books, 2001).

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada partai PDI-Perjuangan yang mampu memanfaatkan beberapa faktor sehingga mendominasi dan bertahan dalam Pemilu di Kabupaten Dharmasraya, baik itu Legislatif maupun Eksekutif. Berdasarkan fenomena diatas, berhasilnya dominasi PDI-Perjuangan di Dharmasraya yang notabennya masyarakat Minangkabau tidak menyukai history partai ini, serta suksesnya PDI-Perjuangan mendominasi Pileg dan Pilkada periode 2014 dan 2019 mengalahkan partai-partai lain dalam pertarungan di ranah politik, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait *survivalitas* dalam dominasi politik PDI-Perjuangan yang efektif meraih kemenangan dalam dinamika perpolitikan di Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat dinamika politik yang terjadi di Sumatera Barat, partai PDI-Perjuangan yang mendominasi pada pentas Pemilihan Umum skala Nasional tidak mampu menempatkan kader terbaiknya di jabatan strategis di Provinsi Sumatera Barat, bahkan menjadi partai dengan persentase suara yang terendah. Partai yang menguasai Sumatera Barat biasanya adalah partai Golkar yang saat Orde Baru juga mendominasi daerah Sumatera Barat, dan diikuti oleh dominasi partai Demokrat dan Gerindra. Pada Pileg 2004 merupakan kali pertama perwakilan ABRI tak lagi ada di DPRD Provinsi yang mana perolehan kursi terbanyak yaitu dari partai Golkar.

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Sumatera Barat periode 2004 dan 2009

No	Partai	Jumlah Kursi 2004	Jumlah Kursi 2009
1	Golkar	16	9
2	PAN	10	6
3	PBR	3	2
4	PDI-Perjuangan	4	3
5	Gerindra	-	4
6	PBB	5	3
7	Demokrat	-	14
8	PKS	7	5
9	PPP	7	4
10	Hanura	-	5

Sumber : Situs resmi DPRD Sumbar

Kemenangan Jokowi di periode 2014 dan 2019 nampaknya tidak membantu menaikkan kursi PDI-Perjuangan yang mana justru turun ke 3 kursi. Dilihat dari 4 gelaran Pileg terakhir, PDI-Perjuangan tidak pernah menempati lebih dari 4 kursi di Pileg Provinsi Sumatera Barat bahkan rasio kursinya dinilai anjlok.¹⁵

Tabel 1.2

Rasio Kursi PDI-Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Sumatera Barat

No	Pemilu	Kursi PDIP di DPRD Sumbar	Total Kursi	Rasio
1	2004	4	55	7,27%
2	2009	3	55	5,45%
3	2014	4	65	6,15%
4	2019	3	65	4,62%

Sumber : Situs resmi DPRD Sumbar

Adapun jika dinilai dari rasio keseluruhan total kursi, PDI-Perjuangan tidak pernah menempati perwakilannya lebih dari 8% dalam 4 Pileg terakhir. Dari pola

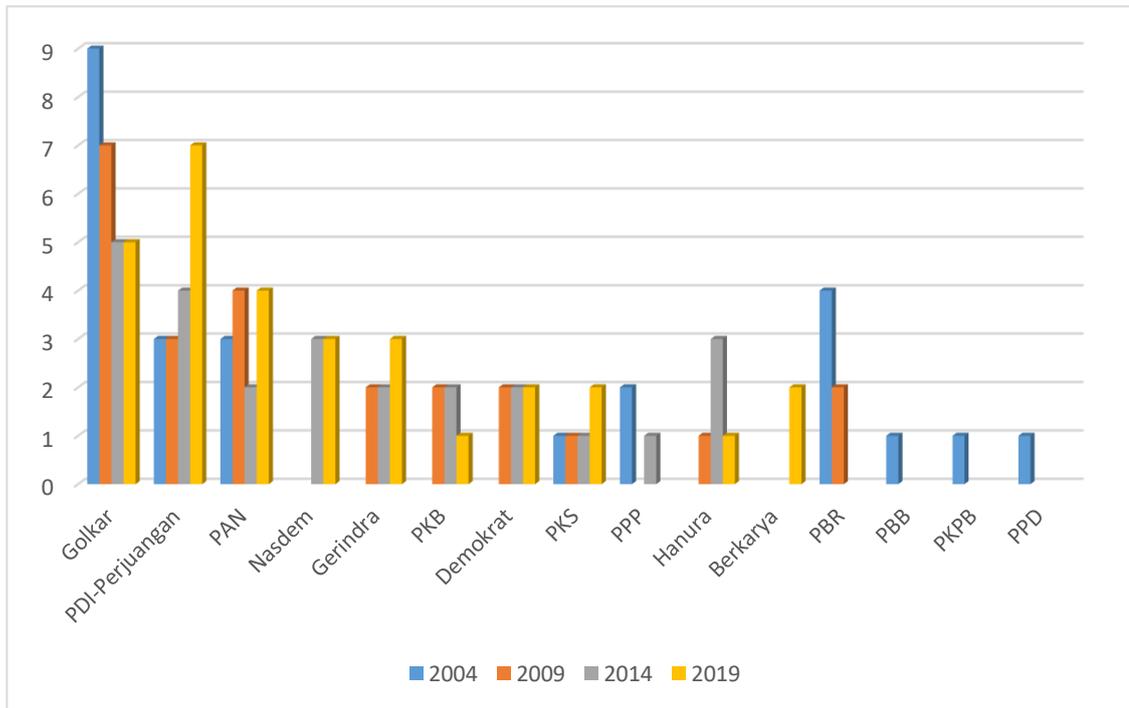
¹⁵ KumparanNews, "Bukan PDIP, Partai Penguasa Sumbar Sejak 2004 Golkar, Demokrat, Gerindra," 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/bukan-pdip-partai-penguasa-sumbar-sejak-2004-golkar-demokrat-gerindra-1u80uDdds3f/1>.

rasionya lebih konsisten anjlok secara gradual, tentunya hal ini mejadi perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan dominasi PDI-Perjuangan di skala Nasional.

Dapat dilihat hampir semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tidak menaruh pilihannya kepada partai PDI-Perjuangan. Dinamika perolehan kursi hanya didominasi oleh partai Golkar seperti di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok, dan partai lainnya baik itu Gerindra, PPP dan PKS. PDI-Perjuangan pada Pemilu 2014 sebenarnya unggul di 3 Kabupaten yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Dharmasraya masing-masing 23% suara, namun diperiode selanjutnya suara dominasi PDI-Perjuangan pada Pileg 2019 di Kabupaten Pasaman Barat turun hingga 14% yang mana pemenangnya adalah partai Gerindra.¹⁶

Berbeda halnya dengan Kabupaten Dharmasraya. Pada Pemilu 2014 dan 2019 menjadi momen dominasi dan *survivalitas* PDI-Perjuangan diranah lokal Kabupaten Dharmasraya yaitu di daerah yang dikenal dengan sebutan “*Ranah Cati Nan Tigo*”. Pada dua periode terakhir ini yaitu periode 2014 dan 2019 Partai Demokrasi Indonesia perjuangan merupakan partai yang mendominasi dalam perpolitikan di Dharmasraya dan menjadi daerah lumbung suara PDI-Perjuangan di Sumatera Barat.

¹⁶ Kompas Litbang, “Pemilu 2019: Dinamika Suara Parpol Di Sumatera Barat,” 2019, https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/63a0298d77a57f2abcd6d09e.



Sumber: Arsip DPRD Kab. Dharmasraya serta Pusat Kajian Politik UI 2014 dan Kabupaten Dharmasraya dalam Angka 2020 (BPS)

Grafik Diagram Batang 1.1

Perolehan Kursi Pileg Dharmasraya periode 2004, 2009, 2014 dan 2019

Dari data yang didapat dalam KPU Dharmasraya, bahwa ternyata dari fenomena *survivalitas* PDI-Perjuangan di Kabupaten Dharmasraya ini dikarenakan ada satu faktor yang mempengaruhi yaitu dukungan publik, yang mana dukungan publik dari setiap periodisasi pemilu itu signifikan. Dapat dilihat dari hasil partisipasi pemilih pada pemilu setiap periodesasinya mengalami kenaikan setiap periodenya.

Hal ini menjelaskan bagaimana PDI-Perjuangan mampu melaksanakan strategi politiknya dengan upaya-upaya menguatkan dukungan massa kepada partai melalui basis pendukungnya yang telah mengidentifikasi orientasi politiknya

pada nilai-nilai partai. Dikarenakan dapat dilihat periode-periode sebelumnya partisipasi pemilih dapat dikatakan belum terlalu maksimal kepada partai ini yang mana strategi PDI-Perjuangan dengan memanfaatkan dukungan basis sosial secara etno politik belum signifikan dan pengusungan kader partai dipentas pemilu juga belum memperhatikan ketokohan yang memiliki jaringan-jaringan elit sehingga mampu menjadi daya tawar bagi masyarakat dikawasannya.

Faktor etno politik pada dasarnya dapat mempengaruhi dominasi partai politik dikarenakan adanya afiliasi politik disana. Akan tetapi, persoalan ini belum terlalu kuat yang terjadi pada periode 2004 dan periode 2009 di Kabupaten Dharmasraya, sebab PDI-Perjuangan belum terlalu mayoritas walaupun sebenarnya telah mendominasi 3 besar pada 2 periode awal tersebut. Hal ini disebabkan pengaruh rezim Orde Baru dengan Golkarnya sehingga masih ada dominasi persaingan antara Golkar dan PDI-Perjuangan pada periode tersebut. Belum terlalu dominannya PDI-Perjuangan juga disebabkan waktu itu masih masa transisi dari pemekaran Sawahlunto/Sijunjung sehingga pastinya pengaruh-pengaruh kabupaten induk masih kuat, yang mana Sawahlunto sebagai lumbung Golkar mulai dari dulu hingga sekarang masih dominan disana.

Pada dasarnya faktor etnik telah menunjukkan orientasi politik mereka terhadap PDI-Perjuangan yang mana pada periode 2004 PDI-Perjuangan mampu menjadi partai 3 besar di Dharmasraya, sedangkan pada periode 2009 PDI-Perjuangan mampu berada pada posisi kedua yang dominan dalam perolehan suara, hal ini mengindikasikan partai ini telah mulai menunjukkan eksistensi mereka di khalayak publik, dan pada periode 2014 dan 2019 dominasi benar-benar terlihat

yang mana tidak hanya pemerintahan Legislatif saja PDI-Perjuangan mendominasi, akan tetapi dalam pemerintahan Eksekutif daerah partai ini juga menang di 2 periode berturut-turut, tentunya hal ini terdapat suatu strategi politik dan kompetisi politik yang dijalankan dibalik dari faktor etno politik tersebut.

Melihat persaingan dominasi antara partai Golkar dengan PDI-Perjuangan di 2 periode awal tersebut, nampaknya pemanfaatan etno politik bersamaan dengan strategi dan kompetisi politik yang dijalankan mulai membuat PDI-Perjuangan benar-benar *survive* disana, melalui data diatas pula eksistensi PDI-Perjuangan Pada pemilu 2014 mulai mewarnai perpolitikan di ranah lokal, PDI-Perjuangan mampu meraih suara tertinggi di daerah ini, terlihat pada perolehan suara Pemilihan Legislatif Kabupaten Dharmasraya, PDI-Perjuangan dapat meraih 16,35% suara dan hanya selisih sedikit setelah partai Golkar dengan persentase suara 17,51%.

Sedangkan dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Dharmasraya tahun 2019 terdapat 4 Dapil dengan 10 partai politik yang bersaing memperebutkan 30 kursi DPRD Dharmasraya dengan keunggulan suara mayoritas diraih kembali oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Jejak dominasi kemenangan ini semakin dikukuhkan melalui keberhasilan calon Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang merupakan salah satu kader yang diusung PDI-Perjuangan dalam Pilkada tahun 2015. Calon yang diusung PDI-Perjuangan Sutan Riska berhasil mendapatkan suara hingga 63,75%. Kemenangan ini cukup menarik perhatian khalayak publik yang mana ia baru menginjak usia 26 tahun ketika terpilih menjadi kepala daerah Dharmasraya.

PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Eksekutif periode 2020 kembali mendominasi perolehan suara dari kader mereka yaitu incumbent Bupati Sutan Riska terbukti dengan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah periode 2020 pasangan Sutan Riska- Dasril Panin Datuk Labuan memperoleh 63,6% suara, mengalahkan saingannya dari partai PAN yaitu Panji Mursyidan-Yosizal yang hanya memperoleh suara 36,4%.

Tabel 1.3
Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dharmasraya periode 2015 dan 2020

No	Calon	Partai	Suara Rakyat 2015	Suara Rakyat 2020	Persentase 2015	Persentase 2020
1	Sutan Riska- Amrizal	PDI- Perjuangan	61.775	71.590	63,75%	63,6%
2	Adi Gunawan- Johnson Putra	Golkar	35.122	-	36,25%	-
3	Panji Mursyidan- Yosizal	PAN	-	40.934	-	36,4%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum: Disarikan Litbang Kompas/DDY

Dari beberapa data diatas dapat dilihat PDI Perjuangan nampaknya berhasil mendapatkan mayoritas suara masyarakat Dharmasraya dengan berbagai faktor-faktor yang membuat PDI-Perjuangan dapat mendominasi beriringan dengan meningkatnya elektabilitas partai politik. Hal ini dibuktikan dengan dominasi pada Pemilihan Umum 2014-2019 yang mana PDI-Perjuangan mampu meraih suara tertinggi diwilayah ini dengan 27,48% suara. Sedangkan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 partai Golkar mulai disaingi dengan perolehan suara kurang dari 1 persen dengan PDI-Perjuangan.

Pada Pemilihan Legislatif ini PDI-Perjuangan cukup mendominasi 16,35% dengan sedikit selisih dengan partai Golkar 17,51% sedangkan partai yang menduduki posisi ketiga selisihnya cukup jauh dengan 10% suara saja yaitu partai Nasdem. Walaupun demikian PDI-Perjuangan dapat menempatkan Anggota Dewan mereka menduduki jabatan strategis di Legislatif Dharmasraya seperti Wakil Ketua DPRD dan Ketua AKD lainnya. Selain itu pada pemilihan kepala daerah PDI-Perjuangan mampu memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dengan mengusung calon bupati dari kader mereka yaitu Sutan Riska mengalahkan incumben dari partai Golkar Adi Gunawan untuk periode 2014-2019.

Sedangkan ketika melihat pada periode 2019-2024 partai PDI-Perjuangan juga sangat mendominasi bahkan juga memiliki peningkatan persentase suara di DPRD Dharmasraya yang sangat signifikan, dengan menempati 7 kursi dengan ketua DPRD dari partai PDI-Perjuangan itu sendiri. Pada DPRD provinsi Dapil VI daerah Dharmasraya juga ditempati oleh kader PDI-Perjuangan yaitu Leli Arni nomor urut 1, disisi lain untuk Pemilihan Kepala Daerah sendiri partai PDI-Perjuangan yang mengusung kembali incumben Sutan Riska mampu mendulang suara terbanyak untuk menduduki jabatan Eksekutif Dharmasraya, hal ini mengindikasikan PDI-Perjuangan mampu mendominasi mulai periode 2014-2019 hingga 2019-2024.

Pada kompetisi politik yang terjadi di kepemiluan di Dharmasraya, partai ini pada dasarnya bisa saja kalah dengan partai yang berkuasa di perpolitikan Sumatera Barat, seperti Partai Golkar, Demokrat maupun PKS yang telah menjadi partai dominan, hal ini didasari secara historis etnis Minangkabau tidak menyukai

partai ini. Akan tetapi PDI-Perjuangan mampu menggunakan strategi politik, partai ini memanfaatkan etno politik yang ada di Dharmasraya yang mana Etnik Jawa sendiri pada dasarnya dari dahulu telah mengidentifikasi orientasi politiknya terhadap nilai-nilai PDI-Perjuangan sebagai ideologi nasionalisme yang merupakan refleksi dari Presiden pertama Soekarno. Selain itu pemanfaatan strategi politik dan kompetisi politik yang dibangun melalui kader-kader mereka yang memiliki ketokohan di politik lokal, menjadi modal penting bagi PDI-Perjuangan dalam mendominasi dan bertahan di perpolitikan Dharmasraya periode 2014 dan 2019.

Kemenangan PDI-Perjuangan ditengah suara yang minoritas di Sumatera Barat membuktikan wilayah ini memiliki karakteristik khusus. Dalam hal ini PDI-Perjuangan mampu mendominasi diranah politik ataupun pemerintahan di Dharmasraya karena cukup dekat ikatannya dengan masyarakat Dharmasraya yang cukup loyalis dengan partai ini, hal ini di dasari masyarakat Dharmasraya multietnis yang merupakan sebagiannya dari Suku Jawa¹⁷ dengan persentase 33%, sebagian besar berasal dari petani dan pedagang yang juga memiliki ikatan historis dengan PDI-Perjuangan karena partai ini dikenal dengan jargon “*Partai Wong Cilik*” atau secara simbolik merefleksikan sebagai partai yang melambangkan kerakyatan¹⁸.

Sehingga dengan kemiripan status ekonomi menengah kebawah antara etnis Jawa (etnik pendatang) dan Minang (etnik lokal) di daerah ini membuat masyarakat

¹⁷ Linda Adkhiyah, “Sepertiga Penduduknya Merupakan Orang Jawa, Begini Asal-Usul Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya,” *Harian Haluan* (Padang, September 7, 2023), <https://www.harianhaluan.com/news/1010074989/sepertiga-penduduknya-merupakan-orang-jawa-begini-asal-usul-terbentuknya-kabupaten-dharmasraya?page=2>.

¹⁸ Krisna Wisyanto, “Studi Tiga Wajah Partai: Otonomi Dalam PDI Perjuangan Di Surakarta” (2022): hal 2-3.

memiliki hubungan yang baik antar sesama. Secara demografi politik di daerah ini merupakan daerah yang berbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi yang mana daerah ini adalah lokasi tujuan transmigrasi bedol desa masa presiden Soeharto tahun 1970-an. Sehingga menyebabkan daerah ini menjadi wilayah dengan pluralitas yang membuat dinamika politiknya berbeda dengan daerah Sumatera Barat Lainnya.

Adapun karakteristik yang melekat pada sebuah Etnik Jawa di daerah ini yaitu munculnya perasaan sebagai bagian dari satu komunitas (*sense of community*) di antara para anggotanya. Perasaan ini nantinya membuat individu-individu di dalam komunitas itu terdorong untuk membangun persaudaraan (*fraternity*) khusus bagi mereka. Hal ini terutama bagi mereka yang hidup di daerah lain yang jauh dari jangkauan sanak dan family.¹⁹ Hal ini berkaitan dengan Etnik Jawa yang telah berkependudukan tetap di Kabupaten Dharmasraya mulai menjalin kedekatan persaudaraan dengan Etnik Minang melalui amalgamasi sehingga ada rasa saling keterkaitan dalam menentukan pilihan di pemilu, ditambah lagi PDI-Perjuangan secara pecitraan adalah partai yang dekat dengan rakyat kecil menjadi modal mendulang suara dari Etnik Jawa-Minang kalangan menengah kebawah di Kabupaten Dharmasraya.

Pengaruh dari heterogen etnisitas ini mampu menggambarkan kemenangan PDI-Perjuangan di Dharmasraya, suara PDI-Perjuangan di Pulau Jawa terlihat sangat mendominasi disebabkan Etnik Jawa yang juga dekat dengan partai yang

¹⁹ Abdul Halim, *Sosiologi Politik Etnik : Studi Otoritas Dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, ed. Rifqi Faiza Rahman, 1st, 2019th ed. (Malang: Intelegensia Media, 2020).

merefleksikan kedekatan “partai rakyat kecil” dengan masyarakat kalangan menengah kebawah. Hal ini dibandingkan dengan daerah di Sumatera Barat yang mayoritas Etnik Minang yang mana PDI-Perjuangan sendiri tidak mampu meraih kemenangan, akan tetapi ketika berada pada daerah yang memiliki persentase Etnik Jawa yang cukup besar dapat didominasi oleh partai yang berlambangkan banteng bermoncong putih ini.

Hal ini telah dibuktikan oleh Tugimin, salah seorang transmigran kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah, yang berhasil menduduki kursi Wakil Bupati Dharmasraya periode 2005-2010. Tugimin sendiri merupakan kader dari partai PDI-Perjuangan yang berpasangan dengan Bupati Marlon Martua melalui Pemilihan Umum Bupati Dharmasraya 2005. Terpilihnya pasangan ini dianggap sebagai bentuk dari keterbukaan etnis Minang di Dharmasraya²⁰. Pada Pilkada selanjutnya pasangan Adi Gunawan dari partai Golkar berpasangan dengan Syafruddin R. berhasil memenangkan Pilkada 2010. Selanjutnya pada Pilkada 2014 dan 2019 dominasi PDI-Perjuangan mulai terlihat dengan mengusung kadernya yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan memenangkan Pemilihan Umum Bupati Dharmasraya Periode 2015 dan 2020, dibarengi dengan dominasi PDI-Perjuangan pada kursi Legislatif periode 2014 dan 2019. Sehingga terlihat suatu fenomena menarik dari eksistensi PDI-Perjuangan dalam 2 periode berturut-turut baik di Eksekutif maupun Legislatif di ranah politik lokal.

²⁰ Mursyid Ali, *Pengembangan Wadah Kerukunan Dan Ketahanan Masyarakat Lokal Di Berbagai Daerah*, ed. Mursyid Ali (Departemen Agama RI, 2006).

Selain faktor etnik politik tersebut, terdapat strategi politik dalam upaya membangun citra publik oleh partai yaitu masyarakat yang loyalis PDI-Perjuangan tersebut kebanyakan tidaklah memikirkan asal usul suku dari seorang kader partai melainkan lebih melihat ketokohan seorang kader yang dekat dengan masyarakat dan rekam jejak kader partai yang lebih memerhatikan kehidupan masyarakatnya lah yang akan dipilih. Seperti kader yang popularitasnya cukup digemari oleh masyarakat yaitu Bupati Sutan Riska yang popularitasnya dibarengi dengan ketokohan sehingga masyarakat tidak sungkan untuk memilih partai PDI-Perjuangan dalam pesta Pemilihan Umum di Dharmasraya, Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Dosen Ilmu Politik FISIP Unand Asrinaldi.²¹

“.....Di Sumatera Barat selama ini, di tempat kader PDIP itu menang, ketokohan figur lebih dominan daripada ideologi partai. Sepanjang PDIP bisa mencari tokoh yang relevan dengan kebutuhan, tokoh itu akan dipilih.....”

Akan tetapi juga tidak menampik bahwa pengaruh dari kelas sosial juga membentuk sebuah preferensi politik terhadap nilai-nilai partai yang juga disampaikan oleh Dosen Ilmu Politik FISIP Unand Asrinaldi sekaligus pengamat politik.²²

“Contohnya, Sutan Riska di Dharmasraya, Agus Susanto di Pasaman Barat bisa terpilih karena banyak orang Jawa. Kalau di Mentawai banyak orang kristen. Jadi ini soal karakterstisk masyarakat dan figur”

²¹ CNN Indonesia, “4 Kemenangan PDIP Dan Mitos Warga Sumbar Anti-Moncong Putih,” 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201211205653-32-581185/4-kemenangan-PDIP-dan-mitos-warga-Sumatera-Barat-anti-moncong-putih>.

²² Wahyu Saputra, “Unggul 4 Daerah Pilkada, Warga Sumbar Tak Benci PDIP?,” *GATRACOM*, 2020, <https://www.gatra.com/news-498150-politik-unggul-4-daerah-Pilkada-warga-sumbar-tak-benci-PDIP.html>.

Selain itu relasi ketokohan dengan peran elit baik itu elit formal seperti kepala daerah yaitu Bupati Sutan Riska dan anggota dewan DPRD Dharmasraya, juga menjadi peranan partai ini *survive* di Dharmasraya sehingga masyarakat cukup dekat dengan PDI-Perjuangan dengan program politik yang dikampanyekan melalui kompetisi politik oleh kader-kader di pemerintahan, dari tokoh tradisional seperti Alim Ulama, dan Niniak Mamak dari kerajaan Padang Laweh dan Siguntur seperti halnya peran dari Rajo Padang Laweh yaitu Sutan Alif Tuangku Sutan Muhammad dan Penghulu Suku Piliang Arifin Dt. Rajo Malano²³ juga turut serta dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk menaruh pilihannya pada kader PDI-Perjuangan yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku penerus kerajaan Kuto Basa di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya sebagai Raja Koto Besar.

Peneliti berasumsi adanya dominasi dan *survivalitas* PDI-Perjuangan di ranah lokal khususnya Dharmasraya karena adanya faktor-faktor yang mendukung disana, seperti terkait etno politik yang terdapat disana melalui konfigurasi Etnik Jawa yang terdiri dari 33% masyarakat yang sedari dulu juga merupakan loyalis dari tokoh Nasionalis yaitu Soekarno yang merupakan refleksi dari PDI-Perjuangan maka terdapat kecenderungan pemilih Jawa dapat menguntungkan dominasi PDI-Perjuangan. Hal ini berdampak pada *survivalitas* partai melalui kelompok populis untuk memperoleh basis sosial sebagai penyokong partai. Dengan banyaknya etnis Jawa yang berasal dari kalangan menengah kebawah dibarengi dengan etnis lainnya, menjadi modal bagi PDI-Perjuangan mendapatkan massanya. Baik itu

²³ Muhammad Samin dan Aidinil Zetra, "Peranan Elit Lokal Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska-Amrizal DT Rajo Medan Pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015-2020," *Nusantara: Jurnal Ilmu Politik Ilmu Sosial* (2019): Hal 10.

berupa simpatisan yang berasal golongan tertentu seperti kelompok kelas menengah, petani, maupun kelompok elit.

Selain itu, adanya strategi politik yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan upaya-upaya memanfaatkan dukungan basis sosial partai disuatu daerah yang telah terafiliasi dengan nilai-nilai partai tersebut. Serta melalui pengusungan calon dari kader terbaik mereka dengan dibangunnya citra publik, yang mana kader-kader yang diusung oleh PDI-Perjuangan adalah orang yang memiliki nama di aras lokal Dharmasraya seperti Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang merupakan penerus Kerajaan Kuto Basa sehingga memiliki jaringan dengan Raja-Raja Kerajaan yang ada di Dharmasraya.

Selain itu ada Leli Arni yang merupakan anggota Legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah pemilik STITNU Sakinah Dharmasraya, serta Pariyanto Ketua DPRD Dharmasraya yang telah menjabat tiga periode dengan giatnya menjalankan program pembangunan hingga dilantik menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.²⁴ Melalui kemampuan partai yang menampilkan citra yang baik didepan publik membuat masyarakat berpendapat PDI-Perjuangan adalah suatu partai yang bisa memberikan Jawaban positif dari segi pembangunan dan ekonomi sehingga PDI-Perjuangan dapat menempatkan institusinya ditengah masyarakat pluralis

Terkait dari beberapa dugaan yang peneliti jabarkan dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan karena ditiap periodenya PDI-Perjuangan selalu gagal

²⁴ Henfra Efison, "Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto Dilantik Jadi Waketum DPN Adkasi," *Padek Jawa Pos* (Dharmasraya, 2022), <https://padek.jawapos.com/sumbar/dharmasraya/04/03/2022/ketua-dprd-dharmasraya-pariyanto-dilantik-jadi-waketum-dpn-adkasi/>.

dalam kontes pemilu di Provinsi Sumatera Barat yang tidak berhasil menempatkan orang-orang partainya di posisi penting dalam pemerintahan. Namun berbeda dengan anomali penguasaan partai yang menggambarkan bahwasanya PDI-Perjuangan berhasil dalam mendulang suara dominan dalam lingkup kontestasi lokal, baik eksekutif maupun legislatif di Dharmasraya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana *Survivalitas* PDI-Perjuangan di Kabupaten Dharmasraya dalam rentang waktu berdirinya Dharmasraya hingga Pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan *Survivalitas* PDI-Perjuangan di Kabupaten Dharmasraya dalam rentang waktu berdirinya Dharmasraya hingga Pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menjadi referensi bagaimana *survivalitas* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Dharmasraya.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan partai politik menjalankan sebuah sistem politik dan masyarakat dalam memahami peran partai politik.